



Pandemi Covid 19 dan Ujian Modernitas: Pembahasan Sosiologi Masyarakat Berisiko¹

Sutrisno²

Abstraksi

Modernitas secara esensial membawa risiko dalam praktiknya, begitu pula demokrasi. Dalam konteks menangani wabah Covid19 kita menyaksikan kehidupan masyarakat moderen yang berisiko secara global dihadapkan pada banyak kerumitan. Kenyataannya hampir tidak ada negara yang mampu lolos dari serangan wabah Covid19. Ukuran pembangunan moderen sebuah negara seakan menjadi kurang relevan. Konsep masyarakat berisiko mengajak untuk mengenali moral kemanusiaan sebagai nilai dan perangkat untuk merespon realitas sosial dan transformasinya. Secara epistemologis, kesulitan merekonstruksi moral kemanusiaan terletak pada kredo modernitas itu sendiri. Metode analisis wacana digunakan dalam artikel ini sebagai dialog rekonstruksi 'perdamaian' antara ilmu pengetahuan dan agama sebagai basis kemanusiaan. Jadi dapat disimpulkan upaya untuk membongkar mitos mengenai modernitas pasca wabah Covid19 ditujukan untuk membuka ruang-ruang dialogis yang bersifat partisipatoris untuk mereduksi risiko modernitas yang dapat mengabaikan kemanusiaan itu sendiri.

Kata kunci: *modernitas, masyarakat berisiko, rekonstruksi kemanusiaan, demokrasi partisipatoris, wabah global (Covid19), pasca Covid19*

Abstract

Modernity essentially carries risks in its practice, and so does democracy. In the context of handling the Covid19 outbreak and its complexities, we witness the lives of modern societies are at risk globally. In fact, there is almost no single nation-state has been able to ideally escape to preventing to the Covid19 outbreak. A developed modern nation-state modern seems to have difficulties as well in coping with the spread of the outbreak. The concept of risk societies invites us to identify means of restoring moral and humanity as values and tools for responding to social reality and its transformation. Epistemologically, the difficulty in reconstructing moral values of humanity lies in the creed of modernity itself. Discourse analysis method applied for this research to reconstruct a compromise dialogue between science and religion for the basis of humanity. So it can be concluded that the effort to debunk myths about modernity of post Covid19 outbreak is aimed at opening up participatory dialogical spheres to reduce the risks of modernity that may ignore humanity.

Keywords: *modernity, risk societies, reconstruction of humanity, participatory democracy, global outbreak (Covid19), post Covid19*

A. Pendahuluan

Anthony Giddens (1990) menganalogikan modernitas sebagai impuls jurgenaut yang bergerak tak terhentikan; kini, diawal tahun 2020, pandemik Covid19 yang melaju bagai truk besar tak terkendali. Tidak satupun negara yang betul-betul telah bersiap menghadapi pergerakan virus ini, bahkan

keberhasilan mengendalikannya tidak mempunyai hubungan dengan tingkat kemajuan sebuah bangsa dalam ukuran-ukura moderen. Penyebaran Covid19 ini sangat cepat karena sifat genetiknya, bukan layaknya virus biasa yang dikenal selama ini. Dan, modernitas lambat-laun tetapi pasti dipertanyakan ulang kompatibilitasnya dalam merespon persebaran

¹ Untuk kutipan atau sitasi artikel ini: Sutrisno. 2020. "Pandemi Covid 9 dan Ujian Modernitas: Pembahasan Sosiologi Masyarakat Berisiko." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol 7 (2): 169-188

² Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Email: trisnosuki@gmail.com

Covid19. Kemajuan (*progress*) yang diusung modernitas kembali dipertanyakan, tentang “tujuan-tujuan kemanusiaan”, sebuah istilah yang sebetulnya tak tertera dalam kamus modernitas itu sendiri. Bedakan, misalnya dengan umumnya bencana alam, pandemik yang menyebabkan krisis global awal tahun 2020 bukanlah hadir diluar kegiatan manusia moderen. Melainkan implikasi kerjanya sendiri, tidak lebih dari eksplorasi manusia atas alam. Instrumen keuangan global mudah untuk melihat derajat risiko ini. Misalnya, dilihat pada penurunan ekonomi global. Lembaga Keuangan Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi global akan mengalami resesi hingga -3% (minus 3 persen). Bahkan, jika sejumlah negara tak mampu merespon peredaran virus ini diebutkan akan mengalami kondisi terburuk sejak depresi besar tahun 1930-an.

Perkembangan pesat virus Covid19 menjangkiti lebih dari 60 negara pada akhir Februari menurut laporan Global Initiative on Sharing All Influenza Data yang diinisiasi Johns Hopkins CSSE, Indonesia masih belum menemukan orang terjangkiti virus ini. “Belum menemukan” adalah sebuah klausul yang sulit dimengerti dalam pandangan instrumen administrasi negara moderen. Paling tidak mendorong aneka spekulasi dalam merespon klausul ini, yang tentu saja diantaranya dibangun tanpa dasar ilmu pengetahuan. Pertama, asumsi bahwa persebaran virus ini berhubungan dengan aspek genetis. Etnis Melayu dianggap lebih tahan terhadap Covid19. Kedua, kondisi alam, bahwa virus ini tidak tahan terhadap panas. Ketiga, menghubungkannya dengan agama atau keimanan. Keempat, perspektif

diluar tiga pandangan itu, adalah kelemahan pemerintah dalam merespon secara cepat dampak perkembangan virus ini. Spekulasi ini bergerak liar, meminjam format berpikir Auguste Comte, menunggu instrumen modernitas ilmu pengetahuan bergerak sebagai wasit.

Hingga kemudian pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan dua orang terjangkit di wilayah Depok, Jawa Barat. Dua orang ini dipastikan bersentuhan dengan negara luar. Tidak sebagaimana di nagara virus Covid ini berasal, masuknya virus di Indonesia ditengarai mempunyai hubungan dengan stratifikasi sosial karena dua orang yang diumumkan presiden ini berasal dari strata sosial menengah. Paling tidak, dua orang yang awal terjangkiti ini secara sosial melesat kosmopolit meninggalkan jutaan orang-orang dalam kompetisi mendekati sumber-sumber ekonomi. “Manusia kosmopolitan” diidentifikasi mempunyai kerentanan yang tinggi atas Covid19. Dua orang itu, masing-masing seorang ibu (64 tahun) dan putrinya (31 tahun) yang kontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID19. Dan, warga Jepang ini baru terdeteksi Covid19 di Malaysia, setelah meninggalkan Indonesia. Pertemuan dua orang ibu-anak ini dengan orang berkebangsaan jepang ini dilakukan di sebuah pesta dansa. Sebuah media on line menulis, “Kasus COVID19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma & Amigos, Jakarta” (<https://www.halodoc.com/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>). Kisah ini menggambarkan sebuah gaya hidup yang dalam alam berpikir orang Indonesia tergolong tak biasa, alias

bukan dari kalangan masyarakat kebanyakan. Wacana stratifikasi sosial dalam bencana non alam semacam Covid19 seakan menjadi kerikil membangun solidaritas kemanusiaan dan kebersamaan yang memerlukan keserbalintasan identitas sosial.

Penggalan fenomena semacam ini merupakan ujian pembuktian atas janji modernitas. Modernitas, merujuk Ulrich Beck (2009) hadir atas prestasinya mematahkan feodalisme sebagai konsekuensi kebutuhan sistem masyarakat industrial. Segregasi kelompok sosial berbasis sosial-ekonomi mendominasi analisa masyarakat industrial. Namun, melalui konsep refleksif analisis segregasi sosial pelan-pelan kehilangan relevansi, tanpa menghilangkan risiko yang melekat dalam modernitas. Packer (2000) melihat persoalan mendasar modernitas terletak pada penjarakannya terhadap moral. Tantangan modernitas dalam perspektif ini menurut Packer adalah ketidakmampuannya berdamai dengan moral.

Di Indonesia sangat terlihat gejala isu segregasi berbasis strata sosial yang meskipun hadir pada tahap awal, namun kemudian mengendap dalam hampir satu bulan waktu persebaran Covid19. Meskipun upaya negara memilih sosial distancing ala Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nyata memukul kelompok-kelompok rentan sosial ekonomi. Bahkan dalam catatan Oxfam, Lembaga Swadaya Masyarakat asal Inggris, serangan pandemik tidak lebih dari dua bulan telah menghasilkan 574 juta orang miskin baru. Mereka hidup dengan pendapatan kurang dari 5,5 USD per hari. Isu segregasi sosial

menjadi terasa klasik, tidak lagi mengemuka setelah beberapa saat.

Melemahnya isu strata sosial dalam penyebaran Covid19 secara sepintas paralel dengan usangannya analisis kelas atau agregasi sosial berbasis kelompok sosial ekonomi dalam modernitas mutakhir. Selain itu, tentu bisa ditarik sejumlah hipotesa terhadap melamahnya isu agregasi sosial ini. Misalnya saja dengan cara meletakkan sublimasi (ketidakjelasan) faktual mengenai fenomena strata atau kelas sosial, fakta tentang demokrasi yang dengan sendirinya melumpuhkan gerakan berbasis kelas, sehingga mengakibatkan ketakjelasan agregasi sebagai musuh bersama (*common enemy*). Upaya untuk meletakkan asumsi modernitas mutakhir dalam analisis ini ditujukan untuk mempermasalahkan bagaimana instrumen modernitas bekerja dalam mengendalikan wabah Covid19?

B. Metode dan Kerangka Konseptual: Analisis Wacana dan Teori Masyarakat Berisiko

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis wacana untuk membongkar pemahaman tentang realitas sosial, peristiwa, dan proses interaksi. Oleh karena itu, penelitian ini pada dasarnya sebuah proses investigasi untuk memahami fenomena sosial dengan cara membedakan, membandingkan, mengkatalogkan fenomena-fenomena sosial. Data yang tersedia sangat tersebar di banyak media-massa, tetapi hanya terdapat di media arus utama (*mainstream*) dan penerbitan resmi yang

bisa diakses secara umum. Implikasi dalam penelitian kualitatif pada arikulasi retorika yang dapat bersifat informal dan pribadi, sebagai konsekuensi peneliti meminimalkan jarak antara diriya dan yang diteliti. Aspek ini dapat berkembang selama penelitian berdasarkan pada definisi-definisi yang berkembang pula Namun dengan penuh kesadaran mempunyai pengaruh terhadap aspek aksiologis tentang peran nilai dalam penelitian.

Pasca revolusi Perancis cara mengorganisasi diri disandarkan kepada norma yang bersifat taken for granted diletakan pada semangat modernitas. Norma modernitas ini dianggap lebih unggul dibandingkan norma yang pernah hadir sepanjang sejarah peradaban manusia, melalui ikon ide kemajuan (progress). Padahal modernitas betapapun selalu mengandung risiko (Beck, 2009). Jadi modernitas adalah proyek yang belum selesai betul (Giddens, 1990; Beck, 2015), atau terbuka untuk selalu memperbaiki diri melalui konstruksi rekayasa pada aspek moral (Packer, 2000). Dengan kata lain, modernitas seperti corpus terbuka, namun selalu melekat di dalam dirinya risiko-risiko. Pada awalnya analisa terhadap risiko ini dialamatkan pada segregasi sosial semacam kelas sosial, stratifikasi sosial (termasuk kapitalisasi agama). Pada modernitas mutakhir, faktor 'refleksif'-lah yang membuat analisis struktur segregasi sosial itu kehilangan relevansinya. Terminologi refleksif mengacu pada fenomena dimana individu yang berdaulat dengan cara melepaskan diri dari referensi-referensi segregasi sosialnya. Gambaran hari ini sangat mudah dialamatkan kepada faktor teknologi informasi.

Bahkan, Frederick A Hayek, seorang penerima hadiah Nobel untuk kepeloporan bidang ekonomi tahun 1947 jauh hari sebelum hadirnya teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini telah memprediksi faktor refleksif ini. Menurut Hayek, reflektivitas modernitas adalah menunjuk pada;

"...individu sebagai sang hakim tertinggi atas tujuan-tujuannya sendiri, dan kepercayaan bahwa sejauh mungkin pandangan-pandangannya sendiri harus mengendalikan tindakan-tindakannya, membentuk hakikat posisi idealis"

(Hayek, 2001:73).

Individu dalam modernitas mutakhir membuat keputusannya sendiri tanpa referensi kelompok kelas ataupun identitas sosial atau agama. Keseragaman cenderung mendapatkan gugatan, maka kepatuhan dalam modernitas mutakhir sedang mengalami rekonstruksi. Pada kedua periode modernitas ini selalu meyertai risiko.

Ide kemajuan memang tidak otomatis menolak moral. Tetapi moral diposisikan secara ambigu dan memang tidak harus kompatibel. Penilaian moral (moral judgment) yang luput dari gerak sejarah masyarakat modern, dalam perspektif Parker (2000) seperti diperingatkan kembali melalui riset Kohlberg (1984) tentang kualitas moral hubungnuya dengan 'penjarakan' terhadap entitas sosial. Sementara itu rasionalitas diterjemahkan sebagai upaya (usaha) masyarakat moderen menjaga kelangsungan hidup dan identitasnya yang oleh Habermas (1984) dalam *'the Theory of Communicative*

Action’, dilakukan melalui ‘proses-proses produksi’. Proses produksi mencakup tiga dimensi fungsi masyarakat yaitu; reproduksi kultural, kontinuitas tradisi, dan koherensi pengetahuan sehari-hari (praksis).

Reproduksi kultural meliputi proses yang menjamin kontinuitas tradisi dan koherensi pengetahuan praktis sehari-hari. Kontinuitas dan koherensi ini diukur dengan rasionalitas yang dianggap sah sebagai semacam bentuk ‘konsensus’ di masyarakat. Integrasi sosial meliputi dunia kehidupan dimana proses memelihara koordinasi tindakan-tindakan sosial berhubungan dengan usaha untuk menata komunikasi antar pribadi sekaligus menstabilkan identitas kelompok -kelompok sejauh memadai bagi praktik hidup sehari-hari. Koordinasi dan stabilisasi diukur pada solidaritas dari para anggota masyarakat. Sosialisasi dalam dunia kehidupan adalah proses yang menjamin hubungan antara generas mencapai kompetensi umum bagi tindakan mereka.

C. Analisis: Sistem Organisasi Melawan Covid19

Menghadapi krisis global non bencana alam yang secara resmi diumumkan pada bulan Maret 2020 oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) telah berdampak pada usaha keras secara global untuk mendorong semua negara-bangsa untuk menempatkan prioritas utama mengatasi persebaran virus SARS-CoV-2 (Covid19). European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) dalam

dokumen berjudul ‘Technical Report’, pada tanggal 23 Maret 2020 telah mengajukan usulan pada WHO untuk menerapkan strategi ‘sosial distancing’. Konsep sosial distancing mengacu pada kegiatan mengurangi kontak satu orang dengan lainnya. Sepanjang sejarah peradaban modernitas konsep sesungguhnya sudah pernah diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1918 ketika menghadapi pandemik flu Spanyol. Manusia moderen seakan diuji dalam ‘disiplin penjara sosial,’ sebuah format interaksi sosial yang tidak biasa (tidak umum). Keselamatan seakan hanya ditujukan untuk spesies manusia yang memiliki kemampuan untuk mematuhi panduan teknis berinteraksi secara terbatas. Jika dibandingkan dengan persebaran virus HIV-AIDS yang tak diperlukan strategi semacam ‘social distancing’, menurut Yuval Noah dalam Financial Times, edisi 20 Maret 2020 mencermati dampak Covid19 sebagai goncangan besar yang berpengaruh terhadap cara manusia mengorganisasikan diri.

Sistem pengorganisasian khas modernitas dengan segala instrumennya bertaruh untuk berperang melawan persebaran Covid19. Sistem teknis pengorganisasian ini dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, strategi dilematis antara pengawasan yang memiliki unsur totalitarian dan sekaligus pemberdayaan sipil. Kedua, strategi berisiko antara isolasi yang bersifat nasionalis dan sekaligus solidaritas global. Dua pilihan ini seakan merupakan “arus balik” atau yang termnologi Giddens (1990) *impuls juggernaut* (dorongan impulsif dari panser raksasa) dimana globalisasi terpilih sebagai ikon modernitas itu sendiri. *Impuls juggernaut* yang

diakibatkan wabah Covid19 telah memaksa para intelektual untuk merefleksikan atau bahkan meredefinisikan atas sejarah dan tujuan dari pencapaian peradaban manusia terutama modernitas. Sistem organisasi totalitarian dengan segala variasinya yang tidak direkomendasikan oleh peradaban modern lantaran keluar dari semangat pencerahan *aufklaerung* ternyata menemukan kompatibilitasnya dalam menghadapi perang melawan wabah Covid19. Sistem sosial yang menjadi oposan demokrasi bukanlah sebuah model organisasi yang layak dicibir, dibandingkan misalnya dengan pemberdayaan sipil sebagai derivasi demokrasi.

Pilihan atas pemberdayaan masyarakat mengandung risiko, sebagaimana modernitas yang didalamnya juga selalu melekat risiko. Sebagaimana kebebasan selalu mengandung risiko, sulit dihindari keluar dari persoalan etis, yakni “manakah yang paling dapat dikonfirmasi, apakah moralitas untuk mempertahankan kebebasan (yang mengandung risiko) dalam pencegahan persebaran Covid19, atautkah pengendalian sosial melalui perangkat pengekangan individu (yang meskipun bersifat memaksa, tetapi bertujuan untuk keselamatan diri dan masyarakat)?” Pertanyaan semacam itu sesungguhnya tetap dilematis, karena bagaimanapun juga di dalam praktiknya muncul pertanyaan konsep etis apa yang layak (humanis) dan dapat dituangkan secara teknis sebagai upaya penyelamatan itu?

Hingga separuh perjalanan diberlakukannya ketetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah melalui PP Nomor 21 Tahun 2020

dan Keppres Nomor 11 Tahun 2020, tak mudah pula dipatuhi masyarakat. Paling tidak, aspek budaya dan sistem sosial politik setiap negara bahkan komunitas sosial terkecil menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam operasionalisasi konsep social distancing. Fenomena ini menjadi pekerjaan rumah bagi instrumen negara yang notabene merupakan anak kandung negara-bangsa yang dilahirkan melalui modernitas. Dalam kerangka pragmatis, ketidakpatuhan masyarakat masih pula relevan dihubungkan dengan rumusan pertanyaan etis di atas. Di sisi lain sebagai sebuah komunitas bangsa yang merujuk nilai moderen membutuhkan kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri (agregasi) sosial yang menabrak ketentuan PSBB. Tidak terlalu salah menengok hukum sosial meletakkan ciri-ciri sosial ini pada kelas sosial dan agama. Meskipun nampaknya sulit menghindari aspek “politis” (menggunakan apostrop), merujuk kepada buntut warisan suksesi pemilihan presiden. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang tergolong baru menapaki demokrasi tak mudah pula secara sosio-psikologis menanggalkan ketegangan yang baru usai setahun itu. Hipotesis yang dapat dibangun dari proposisi ini adalah, apapun yang keluar dari pemerintah dipersoalkan koherensinya. Bukan sekedar sejumlah konsep semacam lockdown dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) semacam diterapkan Indonesia, sehingga pertukaran informasi di kalangan ilmuwan menjadi sangat vital.

Meminjam pernyataan Yuval Noah (2020), kejasama dalam membangun solidaritas global lintas negara, lintas komunitas, lintas ilmuwan menjadi sangat vital, sekaligus disinilah keunggulan spesies

manusia dalam perang melawan virus ini: Penelitian di Italia menunjukkan bahwa virus ini mengalami mutan di negerinya. Tak dapat dipungkiri, kasus di Italia dengan jumlah korban yang besar melebihi Cina bukan melulu persoalan organisasi tapi mutannya virus. Kesadaran bahwa setiap negara di dunia saling terhubung menyebabkan dunia mengecil telah disadari lama setua globalisasi sebagai peradaban baru umat manusia.

Namun demikian, kesadaran yang dimaksud Noah dalam konteks modernitas disangsikan sebagai terbatas pada bentuk 'kesadaran kognisi'. Tidak secara otomatis sebuah kesadaran moral, karena justru instrumen modernitas memberi andil memenggal kesadaran moral melalui orientasi pengelompokan negara, bahkan mungkin (nilai) agama yang tereduksi dari humanitasnya. Survey *Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene* London mempunyai paralelisme dalam proposisi tersebut. Survey ini memperkirakan bahwa kesehatan global dalam 25 tahun kedepan akan mengalami krisis yang juga berkaitan dengan krisis iklim global. Artinya, kemunculan epidemi merupakan tantangan masyarakat global. Dalam survey itu disebutkan bahwa responden di Asia menjadi jumlah yang besar yakni 72,9% dari 619 responden yang tersebar di 79 negara. Secara umum, laporan dalam survey itu mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga kesehatan tidak cukup memberdayakan masyarakat dalam perawatan kesehatan. Cara manusia mengorganisasikan diri melalui instrumen modernitas masih sangat rentan menerima pandemi

Covid19 karena terjebak pada risiko penciptaan friksi-friksi agregasi sosial.

Terlepas dari ciri-ciri agregasi sosial yang cenderung menabrak norma PSBB, muncul semacam keputusan dari kalangan medis dengan tagar 'Indonesia Terserah'. Ekspresi semacam itu menyusul keriuhan di media sosial tentang seakan pemerintah menyepakati 'herd immunity.' Isu ini memang tidak mempunyai validitas, sejenis false news, tetapi menjadi penting karena 'hidup' sebagai bagian dari dinamika kemerdekaan ekspresi yang secara etis menjadi bagian berdemokrasi. Sementara konsep atau praktik "*herd immunity*" merujuk pada pengertian dimana kondisi wabah diserahkan pada mekanisme seleksi alam, dimana yang kuat bertahan kemudian memiliki daya tahan tubuh (*immune*), yang lemah meninggal dengan sendirinya. Dalam definisi semacam ini konteks tentang *herd immunity* bisa ditarik pada level (urusan) norma global menyangkut, misalnya, Pasal 7 ayat 2 Statuta Roma, "...*pemusnahan sebagai tindakan yang termasuk diantaranya penerapan kondisi tertentu yang mengancam kehidupan secara sengaja...*". Syaraf-syaraf normatif yang mengatur hubungan negara dengan warganya semakin menegaskan bahwa dunia semakin mengerut dan saling terhubung, secara sekaligus tidak menghilangkan karakter profil masyarakat moderen yang selalu mengandung risiko.

Pernyataan semacam itu dalam konteks Covid19, selalu menghadapi persoalan etis. Pemerintah atas nama kuasa diskresi mengeluarkan Perpu yang menyerimpet kebebasan publik, otoritas

pengendali keamanan publik terancam dapat menghentikan wacana dan sumber internet untuk suatu berita yang disensor karena dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Pada sisi ini pula konsep profesionalitas terganggu, bagaimana mungkin menangkap satu-dua yang didefinisikan sebagai pembangkang, sementara negara di saat yang bersamaan seakan menyabotase hak-hak publik. Para pegiat kebebasan menyebutnya sebagai godaan terbesar atas berdemokrasi. Anna Luhrmann dari *the Varieties of Democracy Institute*, Swedia sebagaimana yang dirujuk dalam di harian Kompas, 27 Mei 2020, menunjukkan 48 negara berisiko tinggi mengalami kemunduran demokrasi, 34 berisiko sedang (Indonesia pada posisi ini), dan 47 negara berisiko rendah.

Fenomena mengenai cara-cara penanganan pandemi secara profesional membuka ranah diskusi tentang tumbuh-kembangnya modernitas. Dalam perspektif fungsionalisme Durkheimian, profesionalisme membutuhkan ruang sebagai syarat model masyarakat liberal. Yaitu, jaminan atas deferensiasi struktural sedemikian rupa yang notabene secara simultan menyambut hadirnya ketajaman fungsi-fungsi (institusi professional) untuk berfungsi secara otonom. Otoritas keamanan publik memegang kuasa tafsir atas tugas-tugas keamanan melalui diskresi pengelolaan keamanan. Ini senjata yang paling ampuh dimiliki otoritas pengendali keamanan publik sekaligus paling rawan bagi destruksi moralitas.

Dalam konteks semacam ini, profesionalisme yang menjadi orientasi instrumen modernitas tidak lahir dari ruang hampa. Melainkan mensyaratkan ruang sosial yang menjamin kontinuitas tradisi dan koherensi pengetahuan praktis sehari-hari. Habermas (1984) menyebutnya sebagai reproduksi kultural. Deferensiasi struktural sebagaimana disinggung di atas dalam proses modernitas bersifat imperatif karena berhubungan secara resiprokal dengan kegiatan pengetahuan praktis sehari-hari. Poin inilah yang menjadi lahan kritik ala Madzhab Frankfur, khususnya Herbert Marcuse (2000), terhadap modernitas. Manusia terampas humanitasnya karena tersegmentasi sebagaimana mesin yang bergerak tanpa rasa. Humanitas pada proposisi dalam perspektif Erich Fromm (2019) acap dipertukarkan dengan terminologi kebebasan, jadi janji modernitas sebetulnya omong kosong (absurd).

Pada pilihan pengorganisasian (dimensi pemberdayaan sipil) dalam perang melawan wabah Covid19 mangandaikan “kedewasaan” warga komunitas secara penuh. Di sini pula terdapat risiko. Seperti seekor elang yang mengendap-endap, sehingga tak disadari sang mangsa bilamana serangan itu hadir. Risiko ini bukan sekedar mengenai seberapa kuat pengandaian atas “kedewasaan” masyarakat, tetapi secara sekaligus kekuasaan dalam demokrasi era medsos telah meleleh sedemikian rupa sehingga cenderung mengalami desrupsi. Penataan terhadap tipe ideal demokrasi dengan demikian secara sekaligus menjadi tantangan moralitas moderen. Heru Nugroho merujuk McPherson (2012) menegaskan tipe ideal ini,

“Jadi dalam ideologi demokrasi responsifitas pemerintah terhadap warga negaranya yang setara secara politis harus menjadi dasar pijakannya, oleh karena itu maka negara memiliki kewajiban dalam memberikan peluang dan kesempatan bagi warganya untuk: (1) merumuskan preferensinya, (2) menunjukkan preferensinya pada warga negara dan pemerintah melalui tindakan pribadi dan kolektif dan (3) memberikan bobot yang sama pada preferensinya yang dilakukan oleh warga negara”

(Nugroho, 2012:3)

Sejumlah tugas negara yang memberikan ruang merumuskan preferensi kepada warganya ini mengandaikan kedewasaan warga. Padahal pada sisi lain, bukankah ini justru persoalan mendasar dalam demokrasi, ditambah lagi rezim sosial media yang mempunyai kekuatan dahsyat melipatgandakan versi tentang ‘kebenaran’. Kekusaan yang dibagi-bagi ternyata menyimpan risiko secara tersendiri. Dalam konteks semacam ini dapat dipahami bahwa pertarungan organisasi manusia melawan persebaran Covid19 harus menggadaikan demokrasi.

Di waktu yang bersamaan, wacana sensitivitas atas kemanusiaan menjadi gerakan sosial berskala global. Barangkali ada memang momen yang mengundang perasaan bersama, misalnya dalam perang, tetapi perang selalu mengandung kontradiksi. Perang dalam filsafat Kantinian adalah tindakan yang sama sekali sulit mendapatkan restu rasionalitas kemanusiaan,. Cara perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukuikan tetirah di rumahnya dalam video yang dibagikan ke publik menuai kecaman warga

(Kompas, 13 apr 2020). Abe mereguk secangkir teh sembari membaca dengan ditemani anjingnya, berpesan kepada warga agar berdiam diri di rumah. Warga net mengkritik sebagai kehilangan kepekaan sosial terhadap kesulitan warga yang saat ini sedang bergelut mencari nafkah. Tidak berbeda dengan kasus pernikahan polisi di Indonesia pada awal merebak Covid19 yang juga menuai kritik banyak kalangan. Rasionalitas disini mengacu pada ‘kemasuk-akalan’ setiap usaha melanggengkan hidup bersama. Ini berbeda dengan semata-mata tolok ukur rasionalitas dalam modernitas: kemajuan yang hampir tidak menenggang (Jawa: tepa slira). Secara jelas menggambarkan tentang progress modernitas berarti menggelembungkan terlebih dahulu kue nasional, setelah itu menetes kebawah.

Namun demikian, modus rasionalitas yang mendominasi modernitas menyebabkan solidaritas sesama manusia tidak terartikulasi secara otentik. Aksi solidaritas kemanusiaan secara faktual dipengaruhi variabel entitas sosial atau kelompok. Solidaritas yang paling nyata pada level global adalah nasionalisme. Padahal entitas sosial semacam ini justru hadir sebagai anak kandung modernisasi yang lahir pasca revolusi industri. Ilustrasi dalam skala mondial, misalnya, Amerika Serikat masih tidak mencabut sanksi ekonominya terhadap Iran yang sangat parah kerepotan menghadapi serangan Covid19 sehingga sangat memerlukan impor alat kesehatan. Hal yang sama adalah perlakuan Amerika terhadap Venezuela dan Cuba.

Meskipun pada sisi lain, serangan Covid19 ini agaknya sedikit mengubah peta aliansi konflik di Timur Tengah, sejumlah negara yang semula saling bersitegang, seperti Arab Saudi, Iran, dan Turki cenderung agak bersahabat. Blokade antar negara sebagaimana dilakukan negara-negara kuat atas negara lemah dalam relasi internasional merupakan implikasi rasionalitas modern. Demikian rasionalitas modern beroperasi yang -- sulit untuk mengingkari -- hadir melalui ikon "demokrasi". Dalam konstruksi relasi semacam ini, Indonesia pada era Covid19 seperti "menemukan" hikmahnya. Ketika awalnya Indonesia mengimpor lebih dari 90 persen alat kesehatan, ternyata menurut Menteri Riset dan Teknologi, Bambang PS Brojonegoro (Kompas, 22 Maret 2020), seperti membuka mata bahwa industri dan inovasi lokal cukup berpotensi menghasilkan produk farmasi dan alat kesehatan yang ternyata terlanjur telah diimpor itu.

Sulit diingkari konstruksi demokrasi dalam kerangka pemaknaan semacam ini karena harus dibaca pada tataran empiris ketimbang perdebatan normatif-filosofis. Masyarakat moderen terintegrasi melalui proses koordinasi tindakan-tindakan sosial melalui kuasa rasionalitas instrumental dalam tatanan hubungan antar pribadi dan kelompok dalam merespon dunia kehidupan sehari-hari. Peter L. Berger (1990: 106) melukiskan demokrasi sebagai prestasi bersejarah kaum borjuasi; "demokrasi modern ini jelas merupakan prestasi bersejarah kaum borjuasi, kelas kapitalis yang sedang naik daun". Serangan Covid19 dalam realitas semacam ini sangat gamblang, menyadarkan bahwa modernitas yang

mengusung humanisme tak sepenuhnya mengeratkan solidaritas kemanusiaan. Melalui bekerjanya rasionalitas instrumental maka solidaritas kemanusiaan terhadang agregasi-agregasi sosial. Dan, agregasi semacam ini bukan tidak mempunyai dasar moralitas, apalagi legalitas.

D. Pembahasan Sosiologi Risiko: Rekonstruksi Rasionalitas dan Menyoal Sains

Demokrasi sebagai ikon modernitas merupakan instrumen cara mengukur kualitas masyarakat moderen dalam mengorganisasi diri. Keadaban sebuah entitas sosial, baik besar maupun kecil diukur seberapa kuat menerapkan demokrasi, meskipun mempunyai aneka versi. Bahkan dalam penilaian seorang essais kondang, Goenawan Mohammad yang tersebar melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada tanggal 20 April 2020, ia merujuk peraih hadiah Nobel ekonomi, Paul Krugman, sebagai berikut;

"...bahwa pandemik akan berhenti, tapi demokrasi akan tergerus. Atau orang mulai melihat, bahwa sistem perekonomian - yang kini dimaa-mana ditentukan negara - akan berubah: apa yang disebut tatanan neoliberal akan tak laku".

Godaan terhadap demokrasi hampir selalu berasal pada daya efektivitas sistem herarki kekuasaan. Pergulatan pro dengan anti demokrasi hampir selalu menyertai dimensi moral didalamnya: bahwa demokrai mempunyai kandungan moral lebih

kental ketimbang sistem apapun yang tidak demokratis. Filsafat humanisme diperayai lebih melekat pada demokrasi ketimbang pebelengguan individu dalam otoritarian. Barangakali betul, demokrasi lebih memberikan ruang bagi refleksi humanitas. Tetapi secara sistem tetap menjadi persoalan, seberapa kuat instrumen demokrasi dalam kondisi ini mampu efektif menjegal laju Covid19? Kenyataannya partai politik dalam kondisi ini kehilangan daya “karitatifnya”, tidak layaknya pada pesta demokrasi.

Hubungan antar manusia pada era Covid19 menegaskan hubungan-hubungna kuasa. Demokrasi tidak secara otomatis memberikan penegasan rasional pada hubungan-hubungan kemanusiaan, kecuali mengembalikannya kepada tindakan karitatif, tanpa daya tekan moral sekaligus menggerus afeksi moral. Pada tingkat akut operasionalisasi moral dalam wujud tindakan pun mengalami kontestasi pemaknaan. Tidak ada tindakan moral yang luput dari kontestasi politis karena kesadaran manusia demokrasi selalu menyangkut tentang pengelompokan antar manusia. Terminologi “representasi” dalam demokrasi yang diagungkan ini mengacu pada makna kelompok-kelompok kuasa. Secara impresif Fromm melukiskan sebagai berikut,

“Mereka tidak melihat bahwa tahun 2000 mungkin bukan pemenuhan dan titik puncak kebahagiaan dari sebuah periode dimana manusia berjung keras demi kebebasan dan kebahagiaan, tetapi justru awal dari sebuah periode dimana manusia berhenti menjadi

manusia serta bertransformasi menjadi mesin yang tidak berpikir dan tidak merasa”

(Fromm, 2019: 55)

Upaya manusia moderen dalam gambaran Fromm alih-alih menjadi pengantar bagi kebahagiaan masyarakat manusia justru sebaliknya. Dan, tentu saja meminjam Max Weber pengelompokan ini berbasis rasionalitas-bertujuan. Ini sejarah panjang yang nampaknya terbakukan: mitos, agama dan pandangan metafisis meminjam kerangka pikir Hebermas tunduk pada logika interaksi.

Meskipun secara minimalis wabah Covid19 ini seperti membangun kesadaran imperative tentang bagaimana memaknai ulang sekaligus menggeser dominasi rasionalitas ala manusia modern itu, risiko modernitas berasal dari penempatan terlalu berlebihan pada jenis rasionalitas instrumenal. Ini keberatan (kritik) Mazhab Frankfurt atas modernitas. Kritik ini agaknya belakangan ini kurang memadai. Paling tidak, Covid19 ini mengenalkan suatu jenis rasionalitas “baru” sebagaimana didengungkan Erich Fromm (1987), sulit sepenuhnya reifikasi pada jenis rasionalitas affektif pada modus berpikir manusia modern. Atau, tidak pula jenis rasionalitas emotif dalam pengertian Weber.

Sisi yang membedakan dengan demokrasi pra-medsos (baca: era post-truth) pada hari ini manusia sulit melepaskan cara-pandang penggunaan teori konspiratif. Realitas politik dalam perspektif ini berjalan linier. Alih-alih tindakan pragmatis kemanusiaan sekalipun selalu terbingkai dalam ruang

politik. Sehingga dalam praksis mustahil memisahkan kerja-kerja keringat otoritas kekuasaan dengan politik. Tidak pernah ada kalkulasi dari para saintis politik dan ilmu sosial hubungan demokrasi dengan efektivitas tindakan moral, paling tidak dalam fenomena-fenomena yang mengancam kemanusiaan secara bersama sebagaimana persebaran Covid19 kali ini.

Demokrasi pada tarap ini adalah sebuah cara berorganisasi penegasan pengelompokan antar manusia. Maka, demokrasi merespon Covid19 kemanusiaan abad 21, menyepakati gagasan Erich Fromm (2019), lebih menampakkan wajah penegasan kepentingan yang cenderung saling bertentangan. Penegasan kepentingan ini bahkan tidak malu-malu hadir dalam aneka bingkisan pada pesta demokrasi. Kalaupun hadir di tengah bencana, bingkisan ini hampir mustahil tanpa label partai. Partai politik betul-betul dalam definisi telanjang sebagai instrumen agregasi kepentingan. Pertarungan telanjang ini mengikis kepekaan humanitas itu sendiri. Beradar di media sosial ungkapan keprihatinan seorang warga atas 'ketidakwarasan' anggota DPR yang mengenakan APD lengkap padahal seragam semacam itu lebih dibutuhkan para tenaga kesehatan, ketimbang dikenakan di Gedung DPR Senayan.

Perbedaan mendasar dengan otoritarianisme, demokrasi mengendalikan otoritas pendefinisian realitas secara bersama. Otoritas itu dengan sendirinya tercecceh secara sedemikian rupa, hal yang rentan dalam garis komando. Dalam konstruksi

semacam ini Cina merupakan ilustrasi organisasi yang efisien dan efektif. Di bawah pemerintahan partai komunis Cina bukan hanya negara bergerak bebas mengontrol pergerakan warganya, lebih dari itu realitas sosial didefinisikan secara 'tunggal' oleh Presiden Xi Jinping. Informasi tidak bisa bergerak bebas. Sejak awal Desember sampai akhir Februari 2020 paling tidak 250 orang dihukum karena penyebaran berita yang tidak benar berkaitan dengan Covid19. Narasi media-massa Cina dengan mudah dibanjiri kisah-kisah heroik upaya penyelamatan. Media sosial memberikan efek sangat positif memerangi Covid19. Bukan sekedar efektif dalam mengendalikan organisasi, tetapi cara orang berpikir.

Negara-negara demokrasi atau yang baru berdemokrasi semacam Indonesia sibuk mengutuk asal muasal virus ini berkembang. Sentimen terhadap Cina mendapatkan kembali peluru tembaknya. Di Indonesia belum lagi selesai ekor suksesi (Pilpres 2019) yang penuh hujat terhadap Cina khususnya karena masuknya tenaga kerja asing, era wabah ini menambah lengkap tentang asal-usul wabah ini. Yakni yang beredar di kalangan masyarakat, virus ini berasal dari pasar basah makanan laut di distrik Jianghan, Wuhan. Sebuah kawasan terbesar penjaja hewan laut dan hewan liar di Cina. Cina agaknya mirip dengan negara-negara Arab. Sistem politik sentralistik Cina sangat efektif bukan hanya dalam mengendalikan keliruan informasi, tetapi juga pembatasan pergerakan manusia. Ancaman penangkapan dan pemenjaraan bagi pelanggar. Data yang dikutip artikel Dwi Aries Tina Palubuhu di harian Kompas, 20 April 2020, hingga Februari 2020, Cina

menghukum paling tidak 250 orang karena menyebarkan berita salah tentang virus corona. Dibandingkan negara-negara di luarnya, negara-negara Arab lebih sukses menekan jumlah orang yang positif terjangkit virus Covid19.

Perjalanan panjang peradaban manusia yang berubah drastis melalui penemuan teknologi informasi plus wabah Covid19 di awal tahun ini merupakan akselerasi perubahan itu. Tulisan Robert Glazer dalam majalah Forbes bertajuk *"Covid19 Will Permanently Change The Way Every Generations Lives Here and How"* membangun hipotesis bahwa krisis hari ini mengubah gaya hidup, berarti perubahan dalam pengorganisasian manusia. Kalangan usia generasi baby boomer yang pada dasarnya tidak terlalu dekat dengan teknologi digital pada hari ini dipaksa mengakrabi. Selama di rumah tetap dipaksa bekerja melalui teknologi digital untuk rapat, memesan kebutuhan pokok, dan lain-lain. Keakraban dengan teknologi digital pada usia pekerja baby boomer ini secara otomatis akan berlanjut. Generasi X kelahiran tahun 1965—1980, pada usia mereka sekarang ini adalah pemimpin bisnis, pada era ini berjuang dalam medan yang lain memperjuangkan kelanggengan bisnisnya. Disini ujian bagi mereka

Agama, meminjam istilah Bassam Tibi (2016) mempunyai fungsi sebagai alat penyaring dalam mendefinisikan realitas. Dalam konteks masyarakat Indonesia agama merupakan entitas yang tidak bisa diabaikan dalam kerangka memahami struktur tindakan masyarakat moderen. Pencerahan secara perlahan tetapi pasti hadir diantaranya melawan

agama yang mereduksi humanitas. Modernitas sebagai anak kandung *aufklaerung* menghadirkan agama diinstitusikan sedemikian rupa yang menjadi instrumen eksploitasi. Dalam pandangan Bakhsizadeh, agama - termasuk islam - dilucuti dari cara pandangnya terhadap kesucian.

"...significant characteristic of modernity is uncertainty in the reading of history. The traditional understanding of the history of some religions, including islam, considers certain events and episodes as sacred, while for a modern human there is a lack of trust in the certainty of such historical knowledge" (Bakhsizadeh, 2018:198).

Perlucutan atas yang suci di dalam kandungan agama oleh manusia moderen berhubungan secara resiprokal dengan ketidakpastian dalam pembacaannya terhadap sejarah. Kesucian dalam modernitas ditambatkan pada proses produksi nilai bersifat instrumental. Alih-alih meletakkan pada nilai instrumental sebagai 'yang suci' yang terjadi sebetulnya adalah ketidakpastian itu sendiri. Bakhsizadeh menggambarkan cara agama beradaptasi dengan gempuran rasionalitas instrumenal yang dikandung modernitas adalah bermetamorfosa ke dalam 'spiritualisme'. Spiritualisme merupakan bentuk adaptasi agama yang mempunyai kandungan humanisme.

Realitas yang dianalisa Bakhsizadeh adalah sisi adaptasi agama yang bersahabat dengan humanisme, sebagai anak kandung pencerahan (*aufklaerung*) itu, padahal terdapat sisi adaptasi agama yang berseberangan dengan semangat

humanisme sebagai ikon peradaban modern itu sendiri, yaitu fundamentalisme. Bruce Lawrence (1989) dalam kajian agama berpendapat tentang fundamentalisme sebagai berikut,

“...fundamentalism is specific kind of religious ideology. It is antimodern, but not antimodernist. In other words, it rejects the philosophical rationalism and individualism that accompany modernity, but it takes full advantage of certain technological advances that also characterize the modern age. The most consistent denominator is opposition to enlightenment values”.

(Bruce Lawrence, 1989: 23).

Disini, modernitas harus bertanggungjawab terhadap hadirnya fenomena radikalisme-terorisme sebagai risiko. Fundamentalisme-radikalisme adalah agama yang tercerabut dari humanisme. Cara mengembalikan agama pada antroposentrisme dari teosentrisme, sebagaimana ditulis Calhoun (1924);

“The human race must necessarily be anthropocentric in its viewpoint in its objective”

(Calhoun, 1924: 680).

Tidak berhenti pada kalahiran radikalisme, dalam tataran manajemen pengendalian penyebaran Covid19 sangat terasa pertarungan di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia, antara anjuran pemerintah yang tentu saja telah berdasar kajian dan ilmu pengetahuan dengan (keyakinan) agama.

Moral dalam (semangat) modernitas bersifat ambigu, utamanya menyangkut respon terhadap skala

Kohlberg (1984). Kesetiaan seseorang terhadap norma lokal dalam perspektif moral Kohlberg semakin berjarak terhadap moral universal. Norma lokal merujuk pada pengertian longgar menyangkut segala konstitusi regulatif yang dikonstruksi yang terikat pada kelokalan. Dalam kerangka semacam ini barulah bisa dipahami bahwa moral secara rasional bersifat universal. Ketika keputusan moral (moral judgment) diletakan dalam skala preferensi, maka tidak lagi bisa bersifat arbiter dalam batas-batas entitas sosial tertentu (Parker, 2000). Pada kerangka ini, sekali lagi adalah risiko modernitas. Ujarnya lagi,

“...considered the modernist search for a rational justification for moral judgments unrealizable. Moral judgments and imperatives are based instead in a ‘way of life’ which cannot be spelled out fully and which cannot provide rationally compelling grounds to a skeptical inquirer”

(Packer, 2000: 176).

Pembenaran rasional untuk penilaian moral dalam modernitas selalu mengandung persoalan. Ini risiko paling mendasar dalam peradaban moderen. Bukan hanya karena moral merupakan nilai luhur, tetapi justru karena keluhurannya tak bisa diletakan kekuatan memaksa, tidak bisa memberikan kekuatan memaksa secara rasional. Tetapi secara lugas dapat dikatakan nilai ini tenggelam dalam derap semangat utilitarian.

Pasalnya, kemajuan (*progress*) diletakan pada posisi yang sentral. Dalam modernitas moral universal berhadapan secara diametral dengan instrumen

demorasi itu sendiri. Otoritas-otoritas institusi modern yang diperoleh melalui primus inter pares secara berkala harus terlebih dahulu berkhidmat pada konstituen terdekat. Kesetiaan terhadap entitas negara yang dipijak betapapun harus mengalahkan moral (universal). Ini pula yang direstui dalam nilai demokrasi.

Dalam skala global ilustrasinya sangat mudah ditemui, bahkan cenderung vulgar. Amerika tetap bersikukuh menahan bantuan terhadap Iran meskipun korban Covid19 cukup signifikan. Di lingkungan Indonesia instrumen modernitas demokrasi bergerak sangat sublim. Instrumen politik DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) nyaris kehilangan signifikansi, kecuali justru secara tidak etis menggelontorkan rencana membahas undang-undang yang masih kontroversi di kalangan masyarakat. Logika yang terselip dalam terminologi 'legalitas' tak jarang menjadi instrumen anti-moral.

Epidemi Covid19 adalah peristiwa yang bagi ilmu pengetahuan tak mudah ditarik kesimpulan. Harian Kompas dalam "Catatan Awal Pekan", 23 Maret 2020, menulis, "Pandemi ini membingungkan, antara lain karena masih baru. Meski disebut dari keluarga virus korona, yang telah memicu SARS dan MERS, SARS-CoV-2 belum sepenuhnya dipahami". Teknologi kedokteran canggih mutakhir ternyata tak sehebat kelihatannya. Asal-usul virus Covid19 tak betul-betul dapat dipegang secara kokoh sah menurut standar sains. Bahkan, seorang futuristik, ketua Institute Global Future pada *Kellogg School of Management* yang menulis dalam prediksinya tidak menyinggung

sedikitpun tentang wabah sejenis Covid19 ini (Canton, 2009). Buku itu, *The Extreme Future* bertumpu pada derivasi teknologi yang tumbuh secara eksponensial, pada kisaran inilah prediksi hadirnya risiko dalam tata kehidupan manusia di planet bumi. Ini sebuah prediksi masa depan yang "lurus" saja tanpa menghitung variabel lain, semacam minus analisis pada sisi moral.

Namun demikian modernitas tidak mempunyai instrumen lain, selain mempercayai cara menafsir realitas melalui sains. Gaya kuliner ekstrim penduduk Wuhan salah satu hipotesa yang pada dasarnya tidak pula dapat dibuktikan secara meyakinkan. Simpang siur asal-usul ini dalam konteks Indonesia memperteguh konstruksi episteme miring tentang Cina, setelah momen suksesi politik yang juga melibatkan isu negatif tentang Cina.

Tak pelak beredar spekuasi lain. Diantara spekulasi adalah pertarungan kepentingan antar kelompok besar manusia. Sebuah hipotesis konspiratif dikembangkan dalam sebuah video yang diunggah ke Youtube berjudul "Virus pembunuh massal". Video itu bercerita tentang konspirasi Yahudi untuk tujuan menciptakan tatanan dunia baru melalui rekayasa Covid19. Amerika dalam spekulasi ini menjadi proksi Yahudi. Tampilan konflik yang dapat diamati di media-media resmi adalah Amerika versus Cina. Sebelumnya beredar melalui media sosial tentang sebuah buku sains fiksi yang mempunyai kekuatan prediksi masa depan kehidupan umat manusia. Dalam *The Eyes of Darkness*, Konz (1981) menulis,

"... They call the stuff 'Wuhan-400' because it was developed at their RDNA labs outside of the city of Wuhan, and it was the four-hundredth viable strain of man-made microorganisms created at that research center"

(Dean Koontz, 1981:333).

Fiksi ilmiah ini mengukuhkan teori konspiratif tentang proyek besar kelompok ras manusia dengan motif penguasaan atas kelompok ras manusia lainnya. Konflik laten antar ras kelompok manusia tak terhindarkan sebagai konsekuensi modus organisasi dunia dalam kompetisi penguasaan sumber ekonomi ke depan.

Tentu saja, sekali lagi, media mainstream sejauh penelusuran penulis tidak menulis sebagaimana video dalam youtube itu. Video provokatif yang mengaduk-aduk opini publik memberi implikasi kontraproduktif bagi bangunan solidaritas antar umat manusia pada krisis yang mengancam kemanusiaan. Persoalannya tak ada lembaga otoritatif yang hadir memberikan penegasan duduk persoalan. Modernitas dalam ilustrasi semacam ini mengandung cacat bawaan lumpuhnya otoritas pendefinisi realitas. Sebuah kondisi yang tak ditemui pada peradaban sebelumnya. Ujaran Nietzsche menemukan relevansi, "ketentraman hanya butuh keyakinan; sementara kebenaran membutuhkan pencarian".

Modernitas melumpuhkan keyakinan karena mengusung pencarian untuk mengkonstruksi kebenaran versinya sendiri. Otoritas sains itu sendiri

tersublimasi dalam pertarungan banjir informasi, selain sebelumnya pada modernitas awal tersandera dalam sekat-sekat kelas sosial. Terhadap dua spekulasi asal-usul virus korona di atas, otoritas mana yang sanggup memberikan elaborasi yang otoritatif? Ini risiko modernitas paling mutakhir yang tak pernah ditemui sejak awal lumpuhnya otoritas kepakaran. Betapapun entitas sosial bernama negara mempunyai kemampuan mengembangkan teknologi dan membangun kesejahteraan akan selalu melekat risiko.

Terminologi risiko mempunyai dua dimensi yang hadir secara simultan, yakni dimensi makna eufemis sekaligus dimensi sarkastik. Dalam dimensi eufemis, risiko merupakan sinonim dari implikasi tak terduga dalam penerapan (temuan) teknologi. Ini pula nampaknya yang menjadi alasan kebanyakan negara tidak menggunakan energi nuklir. Kecelakaan reaktor nuklir Chernobyl pada tahun 1986 yang mengungsikan 135.000 orang dalam jangka panjang merupakan ilustrasi sulit dilupakan peradaban moderen. Pun ketika sebuah negara secara manifes mengembangkan energi nuklir untuk kebutuhan positif seperti pertanian, listrik, dan pangan akan selalu mengendap kekhawatiran pada fungsi-fungsi latennya. Ini karena sistem organisasi negara-negara di dunia dikontrol negara adidaya.

Risiko dalam pengertian sarkastik menyangkut ketidakmampuan menghadapi prediksi yang akan hadir itu sendiri. Dimensi sarkastik mengacu pada kegagalan ilmu pengetahuan itu sendiri sekaligusantisipasi didalamnya. Sebagaimana

kecewanya Amerika terhadap prediksi kesiapan menghadapi bahaya pada wabah penyakit. Pusat Ketahanan John Hopkins University bekerja sama dengan *Nuclear Threat Initiative* membuat Indeks Ketahanan Kesehatan Global 2019 yang dimuat dalam Jurnal Kesehatan, *The Lancet*, 26 Maret 2020, belakangan melalui hampasan wabah Covid19 ini indeks yang konon melalui kajian serius ini rontok dari kepercayaan publik. Padahal indeks ketahanan kesehatan menempatkan Amerika sebagai negara yang paling siap menghaapi wabah, kemudian disusul Inggris dan Belanda. Peringkat yang jauh secara berturut-turut, Korea Selatan berada pada urutan ke-9; Singapura urutan ke-24; dan, China urutan ke-51.

Kredibilitas produk sains tingkat dunia ini anjlok setelah ternyata realitasnya lain, yakni Cina, Korea Selatan dan Singapura menjadi negara yang paling sukses membendung perkembangan wabah Covid19. Sejauh mana sains dapat dipercaya, meskipun telah ada kalkulasi spekulatif keberhasilan tiga negara ini dialamatkan kepada pengalaman menghadapi wabah sindrom pernapasan Timur Tengah (Mers tahun 2015) dan sindrom pernapasan akut (SARS) tahun 2002-2003. Sains dalam kerangka semacam ini menunjukkan peneguhan Ulrich Beck, yakni selalu mengandung risiko, kalau tidak paradoks. Modernitas sebagai sebuah bagian dari paket peradaban modern pada bagian ini menghadapi krisis titik nadir. Melalui temuan teknologi baru di bidang informasi yang melahirkan 'era medsos' berimplikasi secara langsung terhadap otoritas ilmu pengetahuan itu sendiri.

Sains meskipun alamiahnya mempunyai kemampuan substantif memberikan prediksi dan preskripsi, pada 'era medsos' bukan sekedar tumpul via sublimasi otoritas namun menyuguhkan implikasi ketidakpastian risiko. Refleksi ke dalam ilmu sosial, misalnya dalam ilmu manajemen. Pada ghalibnya ilmu manajemen risiko lebih merupakan memahami cara mengatur risiko daripada mengontrol atau menguasai sepenuhnya risiko.

Pada aspek yang luas, otoritas ilmu pengetahuan tidak lagi sanggup menyuguhkan definisi atas realitas. Tom Nichols (2017) menyebutkan secara telak dalam judul bukunya *The Death of Expertise*. Kematian kepakaran lantaran banjir data. Padahal teknologi yang membantu dalam mendefinisikan realitas yang semula dianggap berkah bagi demokrasi. Ini membuktikan ujaran Aristoteles (348-322 SM) tentang kondisi sebuah sistem kehidupan yang dikatakan sebagai *mobocracy*, sebuah sistem pemerintahan yang rentan terhadap anarkisme.

Dalam sepanjang tulisan ini sains kehilangan orientasi dasarnya, tersesat pada praksis dialektika rasionalitas sepanjang peradaban moderen. Cara kerja sains dalam ritme modernitas yang terputus dari orientasi dasarnya karena berjarak dengan filsafat sebagai kancah refleksi. Istilah refleksi pada modernitas mutakhir tidak merujuk pada semangat filosofis, tetapi sekedar mengacu pada makna keluar dari format kolektif. Fritjof Chopra melukiskannya dalam penuturan ekspresif mengkritik cara kerja ilmuwan modern,

“Para ilmuwan memerlukan filsafat untuk menyadari bagaimana asumsi-asumsi filosofis tersembunyi mempengaruhi teori-teori mereka. Seperti diingatkan John Searle, ‘hingga ketidaksukaan terhadap filsafat adalah membuat kesalahan-kesalahan filosofis’”

(Copra, 2003:78)

Chopra menengarai penyimpangan sains dalam modernitas disebabkan oleh keringnya pemikiran-pemikiran reflektif yang hanya diperoleh melalui diskusi filosofis. Bahkan cara kerja ilmu pengetahuan yang notabene terformat dalam teori-teori yang dipakai tanpa menyadari berangkat dari asumsi filosofis. Ketidakpedulian saintis dalam berdiskusi pada level asumsi filosofislah yang membutuhkan terhadap implikasi pilihan teoritik.

Kemunduran pemikiran reflektif-filosofis di kalangan saintis tentu bukan realitas yang terlepas dari interaksi antara sains dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pragmatis itu sendiri, modus interaksi yang mendapat restu modernitas. Pada aspek semacam ini dapat dipahami keberjarakan proses produksi dengan moral. Sains yang diasumsikan netral dalam peradaban moderen tidak sebagaimana pada kenyataannya, karena justru bisa menjadi sandungan bagi humanitas itu sendiri. Modernitas yang diartikulasikan melalui interaksi sosial tertentu yang bersifat khas pada kenyataannya sangat minimalis sekali, kalau tidak bisa dikatakan lumpuh dalam perang melawan Covid19.

E. Kesimpulan

Awal tahun 2020 modernitas diuji seberapa kompatibel, terutama demokrasi sebagai anak kandungnya, dalam menghadapi krisis global pandemik. Modernitas dengan segala instrumen janji kemajuan masyarakat moderen betatapun canggih tidak cukup memuat aspek altruisme. Di sinilah persoalan dasar modernitas, sehingga gerakan-gerakan atas dasar solidaritas kemanusiaan tumpul. Model organisasi modeern mewarisi cacat bawaan berkenaan dedngan tindakan rasional, sehingga dalam menghadapi serangan Covid19, nyaris tak pernah menghadirkan solidaritas spesies manusia.

Dari sisi instrumen yang menggerakkan rasa solidaritas kemanusiaan, tentu serangan wabah semacam Covid19 secara substantif berbeda dengan fenomena perang. Fenomena perang sanggup membangun solidaritas kemanusiaan, tetapi soidaritas dalam perang hampir selalu disertai aspek rasionalitas instrumenal. Watak dasar yang melekat dalam organisasi moderen adalah segmentasi sosial dimana manusia secara imperatif tersegregasi sedemikian rupa melalui sejumlah institusi sosial, termasuk agama. Segmentasi sosial ini mendapat dukungan kuat secara rasional yang direduksi pada sifatnya yang instrumenal.

Daftar Pustaka

- Beck, Ulrich.2015. Masyarakat Risiko: Menuju Modernitas Baru, (terj. Saut Pasaribu), Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana.
- Beck, Ulrich. 2009. Critical Theory of World Risk Society: A Cosmopolitan Journal Compilation Malden, Oxford: Blackwell Publishing
- Berger, Peter L. 1990. Revolusi Kapitalis (terj. Mohamad Oemar) Jakarta: LP3ES.
- Chaubet, Francois. 2013. Globalisasi Budaya (terj. Feybe I. Mokoginta). Yogyakarta: Jalasutra.
- Etzioni, Amitai.1992. Dimensi Moral: Menuju Ilmu Ekonomi Baru (terj. Tjun Surjaman). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Copra, Fritjof. 2003. The Hidden Connections: Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru, (terj. Andya Primandya). Yogyakarta: Jalasutra.
- Fromm, Erich. 2019. Revolusi Harapan (terj. Hari Taqwan Santoso). Yogyakarta: IRCiSod.
- Fromm, Erich. 1978. Memiliki dan Menjadi: Tentang Dua Modus Eksistensi (terj. F. Soesilohardo). Jakarta: LP3ES.
- Giddens, Anthony.1990. Tumbal Modernitas: Ambruknya Pilar-Pilar Keimanan (terj. Mohamad Yamin). Yogyakarta: Penerbit IRiSoD.
- Habermas, Juergen. 1984. The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press.
- Habermas, Juergen. 1974. Toward a Rational Society. London: Heinemann.
- Hardiman, F. Budi. 2011. Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Moderen. Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Hayek, Frederich A. 2001. Ancaman Kolektivisme, (terj. Ioanes Rahmat) Jakarta: Freedom Institute – Frederich Naumann Stiftung, Jakarta.
- Canton, James.2009. The Extreme Future: 10 Tren Utama yang Membentuk Ulang Dunia 20 Tahun ke Depan. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Kolberg, Lawrence. 1984. The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages. New York: Harper and Row
- Koontz, Dean. 1981. The Eye of Darkness. US: Pocket Books.
- Lawrence, Bruce. 1989. Defenders of God: the Fundamentalist Revolt against the Modern Age. San Francisco: Harper and Row.
- Nichols, Tom. 2018. Matinya Kepakaran (terj. Ruth Meigi P). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Marcuse, Herbert. 2000. Manusia Satu Dimensi (terj). Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Nugroho, Heru. 2012. "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di

Indonesia". Jurnal Pemikiran Sosiologi
Volume 1 (1): 1-15.

Calhoun A. W.2020. "The Moral Challenge of
Sociology". The Journal of Sosial Forces Vol. 2
(5): 680-681

Packer, Martin. 2000. "Escaping Modernity." Human
Development Vol. 43 (3): 170-177

Tibi, Bassam. 2016. Islam dan Islamisme. Bandung:
Mizan.

Bakshizadeh, Marziyeh. 2018. Secular and Human
Reason. Columbia: Barbara Budrich UniPress.